



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 880/IX/2015

III/SEPTEMBER 2015



KOMISI II DAN MENPAN-RB SEPAKAT ANGKAT TENAGA HONORER JADI PNS



KOMISI I :
TNI BERGERAK
KALAU PNG
TIDAK MAMPU



**GKSB PERKUAT
HUBUNGAN PARLEMEN
UNTUK KEPENTINGAN
NASIONAL**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



KOMISI II DAN MENPAN-RB SEPAKAT ANGKAT TENAGA HONORER JADI PNS



Raker Komisi II DPR dengan MenPAN-RB

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Selasa (15/9/15) menghasilkan keputusan untuk mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2) secara bertahap menjadi PNS.

Komisi II dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi sepakat untuk mengangkat tenaga honorer kategori II sejumlah 439.955 orang dan tenaga honorer kategori I sejumlah 1.178 orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, proses pengangkatan status tenaga honorer kategori I dan II menjadi PNS itu mulai dilakukan secara bertahap mulai 2016 hingga 2019 nanti. “Kami akan lakukan verifikasi dahulu karena ada 440.000 tenaga honorer untuk memastikan siapa yang berhak dan bisa menjadi PNS. Dalam pengang-

katan PNS, tidak dipungut sepeser pun. Kalau ada kejanggalan laporkan saja,” ungkap Yuddy.

“Tahapan pemenuhan pengangkatan tenaga honorer kategori II dan I akan dilakukan pembicaraan pada rapat kerja berikutnya untuk mendengarkan terlebih dahulu road map pengangkatan dari Kementerian PAN/RB yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” kata Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman.

Dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan 6 keputusan yaitu yang pertama, Komisi II DPR RI dan KemenPAN-RB sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi.

Kedua, Tahapan pemenuhan pengangkatan tenaga honorer K2 seperti yang disebutkan pada poin satu akan

dilakukan pembicaraan pada rapat kerja berikutnya untuk mendengarkan terlebih dahulu ‘road map’. Pengangkatan dari KemenPAN-RB yang dimulai secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan paling lambat tahun 2019.

Ketiga, Komisi II dan KemenPAN-RB sepakat untuk membicarakan soal dukungan keuangan negara bersama dengan Kementerian Keuangan. Keempat, Berkenaan dengan keputusan bersama tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer K2 akan diagendakan secepat-cepatnya sebelum pembicaraan RAPBN tahun 2016. Kelima, Berkaitan dengan lanjutan pembahasan pagu anggaran tahun 2016 Kementerian PANRB, BKN dan KASN akan dilakukan tanggal 21 atau 22 September 2015.

Dan kesimpulan keenam yaitu, Komisi II bersama KemenPAN-RB sepakat untuk menyiapkan landasan hukum dalam penyelesaian masalah tenaga honorer K2.

“Berkenaan dengan keputusan bersama tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer kategori I dan II akan diagendakan secepat-cepatnya sebelum pembicaraan RAPBN 2016,” ungkap Rambe.

Sementara itu, anggota Komisi II Arteria Dahlan meminta pemerintah untuk melaksanakan enam keputusan atau rekomendasi tersebut. “Meski hanya merupakan keputusan tapi pemerintah harus jalankan,” tegas Arteria Dahlan.

Berkaitan dengan lanjutan pembahasan pagu anggaran tahun 2016 Kementerian PAN/RB, BKN dan KASN Komisi II akan melakukan pembahasan pada tanggal 21-22 September 2015.

(skr) foto: rizka/parle/hr

PIMPINAN DPR KLARIFIKASI PERTEMUAN DENGAN DONALD TRUMP

Pertemuan dengan pengusaha sekaligus bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan bagian dari diplomasi DPR. Tidak ada aturan konstitusi dan UU MD3 yang dilanggar. Pertemuan tersebut lebih banyak membicarakan peluang investasi di Tanah Air untuk membantu program pemerintah dalam memulihkan perekonomian.

Demikian penegasan Pimpinan DPR RI Setya Novanto dan Fadli Zon saat menggelar konferensi pers di Press Room DPR, Senin (14/9). Hadir pula dalam konferensi pers itu Ketua BURT Roem Kono dan Robert Joopy Kardinal yang sama-sama pergi ke Amerika. “Kalau ada yang mengatakan pertemuan itu melanggar konstitusi dan UU MD3, dia harus belajar lagi. Pertemuan ini untuk kepentingan nasional,” jelas Fadli Zon.

Menurut Fadli, ironis bila para anggota DPR mempersoalkan pertemuan dengan Donald Trump. Itu bukan hal yang substansial. Mestinya, lanjut Fadli, Anggota DPR banyak menyuarakan soal perekonomian nasional yang kini sedang melemah, seperti nilai tukar rupiah yang anjlok dan PHK yang terjadi di mana-mana. Mengapa suara DPR soal itu sangat kurang. Sementara suara mengenai pertemuan dengan Donald Trump begitu gencar dilakukan.

“Hal yang ironis mereka begitu peduli terhadap masalah ini (pertemuan dengan Donald Trump). Sementara suaranya jarang kedengaran untuk rakyat. Padahal kondisi sekarang makin susah.



Jumpa Pers Pimpinan DPR RI, Pimpinan BURT dan Anggota Komisi IV DPR

Rupiah melemah, pengurangan makin banyak, mengapa itu yang tidak ditekankan. Itu yang harus diutamakan. Selama ini tidak kedengaran berita itu disuarakan para anggota DPR, seperti mengkritisi dan mengawasi pemerintah. Tahu-tahu ngurus soal Donald Trump,” keluh Fadli lagi.

Dan bila ada anggota yang mendesak adanya pergantian kepemimpinan di DPR, lanjut Fadli, silakan dilakukan sesuai prosedur. “Sejauh ini tidak ada niat ke arah sana dari para pimpinan parpol. Kita sudah berbuat sesuai dengan prosedur supaya tidak salah paham. Kita harapkan kesalahpahaman ini bisa segera selesai,” harap politisi Partai Gerindra tersebut.

Ketua DPR Setya Novanto juga ikut mengklarifikasi pertemuannya dengan Donald Trump. Menurutnya, konteks pertemuan tersebut adalah untuk

menggiring para investor Amerika ke Indonesia. Trump sendiri, katanya, akan membangun hotel di Bogor sebagai bagian dari investasi. “Dalam situasi seperti ini mari kita bergandengan tangan, mari kita membantu program pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional.”

Novanto bahkan telah meyakinkan para investor di Negeri Paman Sam itu tentang situasi perekonomian nasional. Kepastian hukum, kepastian pajak, dan kepastian transportasi di Tanah Air jadi garansinya. Setnov juga menjelaskan kepada para investor Amerika tentang program maritim dan tol laut yang dicanangkan pemerintah. “Saya jamin pemerintah Indonesia memberikan fasilitas yang baik dan infrastruktur yang baik untuk para investor. Inilah tugas kita bersama.” (mh) foto: andri/parle/hr

GKSB PERKUAT HUBUNGAN P TO P



Ketua DPR RI Setya Novanto memukul gong peresmian 49 GKSB

DPR RI secara resmi membentuk 49 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagai upaya memperkuat diplomasi terutama dengan 49 parlemen negara sahabat -- parliament to parliament (P to P). Keberhasilan diplomasi parlemen yang biasa disebut *second track diplomacy* ini dapat meningkatkan hubungan P to P selanjutnya atau *people to people*.

“Fokus kita adalah hubungan parlemen dengan parlemen termasuk juga organisasi parlemen internasional seperti IPU, APA, AIPA dan organisasi lainnya. Hubungan yang baik diantara parlemen yang notabene adalah perwakilan masyarakat tentu akan berpengaruh positif pula pada hubungan p to p, people to people,” kata anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Hamdhani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/15).

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menambahkan kesepahaman diantara parlemen lintas negara telah mampu mendorong pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah produk legislasi diantaranya terkait kemaritiman, kedaulatan pangan, kejahatan internasional, perang melawan narkoba, dll.

Sementara itu Wakil Menlu RI AM Facrir yang hadir dalam acara peresmian tersebut menekankan parlemen adalah bagian penting dalam diplomasi pemerintah. Dalam sejumlah konferensi internasional, anggota parlemen telah menjadi bagian dari delegasi Indonesia.

“Dalam kondisi itu anggota parlemen bukan lagi *second track* tapi istilahnya diplomasi satu setengah. Pada prinsipnya negara harus membuka peluang bagi semua stake

holder untuk saling bersinergi dalam melakukan tugas-tugas diplomasi,” tutur dia.

Acara peresmian GKSBB oleh Ketua DPR Setya Novanto ini juga dihadiri oleh duta besar dari 49 negara. Duta besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik menyebut eksekutif dan legislatif adalah dua kekuatan penting bagi negara, menjalankan diplomasi pada jalur yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama.

“Selamat kepada DPR, acara ini sangat penting. Membangun hubungan baik dengan parlemen itu bisa dikatakan membina hubungan baik dengan masyarakat,” ujar dia. (iky)

foto: denus/parle/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB) secara lebih jauh dapat berperan mengurai tantangan-tantangan yang ada dalam kerja sama bilateral, memperkuat koordinasi dan kerja sama keparlemen dalam konteks bertukar pandangan dalam fungsi-fungsi keparlemen. GKSBB juga dapat berperan lebih jauh dalam menggalang kerja sama bilateral bagi penyelesaian isu global.

Hal itu ditegaskan Novanto ketika meresmikan berdirinya 49 GKSBB di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (15/9). Dalam acara yang dihadiri para Wakil Ketua DPR, para Duta Besar negara-negara sahabat, Pimpinan BKSAP dan Pimpinan GKSBB periode 2014-2019, Ketua DPR menilai hari ini adalah hari bersejarah bagi DPR periode 2014-2019, karena setelah hampir setahun DPR periode terbentuk, GKSBB baru diresmikan.

GKSBB Berperan Galang Kerja Sama Bilateral Selesaikan Isu Global

Menurut Novanto, peran aktif parlemen dalam melakukan diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*) telah lama menjadi bagian Indonesia. Ini tidak lepas dari visi konstitusi (UUD 45) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peran DPR, lanjut Novanto, semakin ditegaskan melalui beberapa UU, seperti UU Hubungan Luar Negeri pasal 5 menekankan bahwa DPR adalah unsure penyelenggara hubungan luar negeri. Juga UU MD3 pasal 69 ayat (2) yang menekankan, fungsi DPR dilakukan dalam kerangka mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.

“Dengan landasan tersebut, DPR mengambil peran aktif dalam berdiplomasi. Medan kami tidak hanya dalam konteks internasional, regional tetapi juga bilateral. Untuk itulah GKSBB ini terbentuk,” ungkap Novanto.

Ditambahkan, pada periode ini DPR memutuskan untuk mengawali hubungan bilateral antarpaulen dengan 49 GKSBB. Jumlah ini mengalami dinamikanya setelah DPR melakukan evaluasi internal mengenai pelaksanaan GKSBB

periode 2009-2014. Ada beberapa negara yang periode sebelumnya memiliki GKSBB, tetapi karena beberapa situasi tertentu seperti konflik, sifat hubungan bilateralnya akan ditangani secara komprehensif dan teknis di level Pimpinan BKSAP.

Sebelumnya Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, pembentukan GKSBB merupakan bagian dari upaya memperkuat dasar kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara lainnya.

Setelah melakukan diskusi secara intens dengan semua pemegang kepentingan, komite memberikan kesimpulan bahwa disana akan ada paling sedikit 49 kelompok bilateral parlemen negara-negara sahabat.

Kebanyakan dari mereka mapan untuk memajukan pelaksanaan secara konkrit bilateral memorandum dan mapan berdasarkan pada prinsip timbal balik.

Pada kesempatan ini Ketua DPR memperkenalkan nama-nama Ketua dan Wakil Ketua GKSBB-parlemen negara sahabat periode 2014-2019 mencakup 49 negara. (mp) *foto: denus/parle/hr*

GKSBB Perkuat Hubungan Parlemen Untuk Kepentingan Nasional

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB) antar parlemen dengan parlemen negara-negara sahabat. Pembentukan GKSBB ini sudah berlangsung dari periode ke periode DPR sebelumnya, dan sekarang ini baru 49 negara yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan.

Ditemui di sela-sela peresmian pembentukan GKSBB DPR Selasa (15/9) sore, di Gedung DPR, Pimpinan DPR Koordinator Politik Keamanan ini mengatakan, masing-masing GKSBB

terdiri 10-12 orang anggota DPR lintas fraksi. GKSBB sekarang ini semakin kokoh karena sudah diakomodir dalam UU MD3 tentang peran diplomasi DPR.

“Ini sudah menjadi tradisi parlemen dan ada diseluruh parlemen dunia plus tugas diplomasi DPR,” katanya.

Ditanya apa manfaat dengan dibentuknya GKSBB, Fadli Zon mengatakan sebagai bagian dari dunia harus bergaul dengan anggota parlemen negara lain. Karena itu GKSBB selain memperkuat hubungan antar parlemen juga antar negara untuk kepentingan nasional. Apalagi di era globalisasi sekarang ini kalau banyak kenal dengan sahabat parlemen negara lain, maka hubungan bidang lain seperti ekonomi, kebudayaan termasuk hubungan politik yang dalam jangka tertentu dibutuhkan.

“Seperti loby di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), loby untuk hubungan multilateral,” ia menambahkan.

Daniel Johan anggota DPR dari FPKB yang menjadi Ketua GKSBB dengan Parlemen Tunisia menyatakan, dengan GKSBB ini maka kita bisa ambil manfaat untuk mempererat hubungan kedua negara dan kedua parlemen. Bisa saling belajar, termasuk meningkatkan hubungan kebudayaan dan perekonomian.

Dubes Tunisia yang hadir dalam kesempatan ini juga



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

menyatakan, negaranya ingin belajar bagaimana Indonesia dengan beragam suku dan agama dengan mayoritas muslim tetapi ada kebersamaan, persatuan dan kekompakan. Sebaliknya, kata Daniel, Indonesia bisa belajar dari Tunisia tentang kemajuan ekonominya dan pariwisata. (mp) foto:

denus/parle/hr

DPR-PARLEMEN TIONGKOK BAHAS EKONOMI GLOBAL TERMASUK PELEMAHAN MATA UANG

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Ketua Grup Kerja Sama (GKSBB) DPR-Parlemen Tiongkok Sareh Wiyono dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti, di ruang Pimpinan DPR Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (17/9) menerima kunjungan Delegasi Komisi Anggaran Parlemen Tiongkok dipimpin Wakil Ketua Liu Xiuwen.

Maksud kedatangannya ke DPR khususnya dengan Banggar DPR adalah dalam rangka bertukar pikiran dan berdiskusi terkait situasi ekonomi global termasuk pelemahan mata uang. “Kita apresiasi kedatangan mereka, sebab hubungan DPR dengan Parlemen Tiongkok selama ini sudah terjalin dengan cukup baik,” kata Taufik.

Menurut Pimpinan Dewan Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini, sekarang kunjungan Delegasi parlemen Tiongkok sifatnya lebih spesifik mengenai anggaran. Sebelumnya, Ketua MPR dan Presiden Tiongkok juga pernah hadir di Gedung wakil rakyat ini.

Kunjungan tersebut, kata Taufik, sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dan sekarang menyangkut hal-hal yang sangat teknis akan dibahas dalam pertemuan dengan



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima Delegasi Komisi Anggaran Parlemen Tiongkok

Badan Anggaran yang saat ini tengah bekerja keras menyusun RAPBN 2016 bersama pemerintah. Mereka ingin melihat langsung bagaimana proses penganggaran, bagaimana proses politiknya dan dukungan transparansi publik.

“Kunjungan Delegasi anggota Badan Anggaran Parlemen Tiongkok sekarang ini adalah waktu tepat. Dalam pembahasan RAPBN 2016 ini diharap-

kan dapat mengakomodir prioritas program kerja pemerintah. Para anggota Banggar bekerja hingga sampai larut malam, hampir dua minggu terakhir bekerja keras,” ungkap Taufik.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, fungsi penyusunan anggaran negara DPR ditangani oleh Badan Anggaran yang merupakan badan strategis dari tiga fungsi DPR. Karena itu pertemuan Banggar dengan Komisi Anggaran Par-

lemen Tiongkok bisa bertukar pikiran lebih teknis termasuk dampak pelemahan berbagai mata uang. “Paling tidak bisa memberikan informasi lebih awal yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kedua negara,” tukasnya.

Sedangkan dalam kaitan hubungan diplomatik kedua negara, Taufik mengatakan, hal ini terkait adanya kedekatan emosional antara Tiongkok dan Indonesia yang diawali saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing dan kunjungan sebaliknya Ketua Parlemen Tiongkok ke Indonesia.

Dalam situasi yang penuh tantangan global ini, Taufik berharap kedua parlemen bisa saling kerja sama, saling mendukung karena beberapa saat lalu Ketua Parlemen Tiongkok

ada semacam keinginan pembukaan bank-banknya di Indonesia. Sebaliknya bank-bank Indonesia juga akan membuka kantor cabangnya di Tiongkok, diharapkan adanya dukungan dari parlemen Tiongkok.

Wakil Ketua Badan Anggaran Parlemen China Liu Xiuwen, menyampaikan penghargaan dan terima kasih bisa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Banggar DPR. “Saya setuju dengan Bapak Taufik bahwa hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sangat penting karena kedua negara dengan populasi yang sangat besar dan sebagai negara yang sedang berkembang. Karena itu strategi perkembangan kedua negara bisa saling mengisi dan mengandalkan,” kata Xiuwen.

Dikatakannya, tahun ini adalah 65 tahun hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia dan selama 10 tahun terakhir hubungan kedua negara berkembang sangat pesat. Sejak dilantik menjadi Presiden, Jokowi sudah mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok sebanyak tiga kali.

Tiongkok selalu mementingkan hubungan dengan Indonesia dan Indonesia selalu menjadi prioritas dalam hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Tiongkok kini tengah mengembangkan pembangunan strategis abad 21 dan Indonesia sedang mengembangkan strategi kemaritiman. “Jadi bisa saling mengisi dan bisa saling mendukung,” pungkask Xiuwen. (mp) foto: andri/parle/hr

KOMISI II TOLAK PENGURANGAN ANGGARAN KEMENDAGRI



Raker Komisi II DPR dengan Mendagri

Komisi II tidak menyetujui pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Dalam Negeri Pagu Indikatif Tahun 2016 sebesar Rp5.983.127.053.000,- menjadi sebesar Rp4.968.104.645.000,- dan mengamanatkan pada Anggota Banggar Komisi II DPR untuk membawa dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR.

Hal tersebut mengemuka dan menjadi butir kesimpulan dalam Rapat Kerja (raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan RDP dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas RKA/KL Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran 2016, Senin (14/09).

Lebih lanjut terkait dengan adanya pengurangan anggaran Kemendagri tersebut, Komisi II meminta kepada Kemendagri untuk melakukan penyusunan pengalokasian anggaran berdasarkan jumlah anggaran sesuai Pagu Indikatif Tahun 2015 sebesar Rp5.983.127.053.000,-, dengan memprioritaskan peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan desa dan terkait pembahasan dan mekanisme pembentukan daerah otonom baru.

Terhadap Anggaran Kemendagri yang belum tertampung dalam Pagu Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp1.996.019.338.000,- dan usulan pem-

angunan Kantor Desa melalui DAK Tahun 2016 sebesar Rp30.000.000.000,-, Komisi II pada prinsipnya dapat menyetujuinya.

“Namun meminta kepada Kemendagri untuk menyampaikan data yang lebih rinci terkait pengalokasian anggaran tambahan tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam pada RDP yang akan datang,” kata Rambe.

Pada raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman tersebut juga disepakati bahwa Komisi II tidak menyetujui jumlah pagu anggaran tahun 2016 yang dialokasikan untuk Pagu Anggaran BNPP sebesar Rp200.600.000.000,- dan mengamanatkan pada Anggota Banggar Komisi II agar dapat memenuhi usulan kebutuhan anggaran BNPP tahun 2016 sebesar Rp263.726.300.000,-.

Selain itu, terkait dengan kegiatan strategis Kemendagri dan BNPP, Komisi II meminta kepada Kemendagri dan BNPP untuk menyampaikan rincian kegiatan strategis dan alokasi anggaran tahun 2015 beserta realisasi penyerapan anggaran dan output dari masing-masing kegiatan dimaksud sampai September 2015 sebagai materi pendukung dalam pembahasan pada RDP mendatang, demikian kesimpulan terakhir Raker Komisi II dengan Mendagri dan RDP dengan BNPP.

(skr) foto: rizka/parle/hr

Komisi IV Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Pertanian



Pimpinan Komisi IV DPR

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai sekitar 5,5%, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong belanja infrastruktur pemerintah salah satunya dalam rangka penguatan sektor pertanian.

Menurut Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, saat ini sektor pertanian Indonesia dihadapkan oleh tantangan yang berat, seperti ketidakpastian harga komoditas pertanian yang ditandai dengan turunnya beberapa harga komoditas pertanian utama Indonesia. Hal ini berdampak cukup signifikan pada perekonomian daerah, serta kondisi perubahan iklim dan musim kemarau yang panjang menyebabkan mundurnya musim tanam yang tentunya berdampak pada jumlah produksi komoditas pertanian.

Dengan fokus yang disesuaikan dengan tantangan dan kondisi yang ada, proses pembangunan sektor pertanian harus terus berjalan. “Komisi IV mendukung belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor pertanian,” kata Edhy Prabowo, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Senin (14/9), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016, Kementerian Pertanian akan melaksanakan pencetakan sawah seluas 200,6 ribu ha, perluasan lahan kering 250 ribu ha, rehab dan pengembangan jaringan irigasi tersier 400 ribu ha, pengembangan Toko Tani Indonesia 1.000 unit.

Selain itu, pengendalian konversi lahan melalui penerbitan pedoman insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), optimasi dan pemulihan kesuburan lahan 275 ribu ha, pengembangan dan pengawalan 1.000 desa mandiri benih, pembangunan gudang 39 unit dengan fasilitas pasca panen, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan 12.000 petani dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu 914 kelompok, penumbuhan wirausahawan muda pertanian 1.000 orang, regulasi pengendalian impor, dan pengembangan desa pertanian organik di 75 desa didukung 250 unit pengolahan pupuk organik.

Dijelaskan, sasaran utama produksi pangan tahun 2016, padi 75,13 juta ton, jagung 21,35 juta ton, kedelai 1,5 juta ton, gula 2,8 juta ton, daging sapi 0,46 juta ton, bawang merah 1,173 juta ton, cabai besar 1,106 juta ton, dan cabai rawit 759 juta ton.

Terkait rencana kerja tersebut, pagu anggaran RAPBN 2016 sebesar Rp.32,85 Triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6,17 Triliun- yang terdiri atas usulan alokasi DAK Provinsi sebesar Rp.350,2 milyar dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.82 Triliun. (as) foto: rizka/parle/hr

MENTAN JELASKAN KONSEP TOKO PERTANIAN DI DPR

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan konsep Toko Pertanian yang akan dibangun di sentra-sentra perdagangan di berbagai daerah Indonesia dimaksudkan untuk menstabilkan pasokan dan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang sering bergejolak.

“Pembentukan toko-toko tani, minimal satu di setiap titik strategis seperti Pasar Cipinang, Kramat Jati dan lain-lainnya di seluruh titik di Indonesia, sejalan dengan upaya stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (14/9) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Amran Sulaiman, keberadaan Toko Pertanian ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk memutus rantai suplai berbagai produk pertanian yang sangat panjang mulai dari tingkat petani hingga konsumen sehingga berdampak pada tingginya harga jual produk pangan di masyarakat,



Anggota Komisi IV DPR Hardisoesilo

terutama saat terjadi kelangkaan pasokan.

Mentan menjelaskan, dalam membangun toko-toko pertanian itu dilakukan kerjasama dengan sejumlah *stakeholder* terkait lainnya seperti Bulog, Kementerian Perdagangan, kelompok-kelompok tani dan bahkan juga melibatkan para mahasiswa pertanian dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk pendampingannya.

Toko-toko pertanian tersebut nantinya diharapkan juga akan dilengkapi dengan fasilitas “cold storage” kapasitas besar untuk menampung pasokan produk-produk hortikultura dan bahan pangan lainnya sehingga gejolak harga bisa dikendalikan dengan adanya manajemen stok yang baik.

“Upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian. Tanpa adanya kerjasama yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, maka konsep demikian tidak mungkin berhasil,” ujarnya.

Mentan menyatakan bahwa Pemerintah akan bergerak cepat jika ada anomali dan pergerakan harga kebutuhan pokok, terlebih ketika terjadi teriakan pada pedagang karena kekurangan suplai dan konsumen karena tingginya harga.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi IV DPR diantaranya Hardisoesilo dari Fraksi Partai Golkar, Ono Surono (Fraksi PDIP) dan Ook Sutisna (Fraksi Gerindra) mempertanyakan

bagaimana konsep toko pertanian mampu mengendalikan melambungnya harga-harga pangan dan berbagai komoditas pertanian lainnya.

Menurut Hardisoesilo, Bulog dulu juga pernah mencoba membangun outlet-outlet berupa minimarket untuk menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. “Namun akhirnya upaya itu macet ditengah jalan, sehingga kami perlu mempertanyakan bagaimana konsep Mentan untuk membentuk Toko Pertanian ini?,” ujar Hardisoesilo.

Oleh karena itu, Hardisoesilo menekankan perlunya Komisi IV menggali lebih dalam atas rencana pemerintah itu agar jangan sampai perencanaan hanya hebat di level wacana saja tetapi kemudian melemah dalam implementasinya.

Hal senada juga dikemukakan Ook Sutisna yang mengatakan bahwa Pemerintah harus belajar dari pengalaman masa lalu terkait kegagalan membangun outlet-outlet bahan pokok pangan masyarakat untuk menstabilkan harga dan pasokannya.

“Untuk percontohan boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik jika lebih memfungsikan KUD-KUD yang sudah ada ketimbang membangun sesuatu yang baru dan belum jelas bentuknya,” ujar Ook Sutisna. (as) foto: rizka/parle/hr

DPR GELAR SOSIALISASI PERJALANAN DINAS STAF ADMINISTRASI ANGGOTA



Suasana sosialisasi bagi Staf Administrasi Anggota DPR

Setiap perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi staff administrasi maupun tenaga ahli anggota DPR RI ada dasar hukum yang mengaturnya. Hal itu yang diungkapkan Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI, Makmur saat membuka sosialisasi tentang perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi staff administrasi anggota DPR RI Periode 2014-2019.

“Perjalanan dinas dalam negeri misalnya, telah diatur dalam peraturan menteri keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Sementara perjalanan dinas luar negeri salah satu-

nya harus mengacu pada peraturan menteri keuangan no.55/PMK.05/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan no.97/PMK.05/2010 tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap,” jelas Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI, Makmur.

Lebih lanjut Makmur yang didampingi oleh Kepala Biro Pimpinan DPR RI, Dewi Barliana, serta Kepala Bagian Perjalanan Sunardi, dan Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Sri Lestari mengatakan, dari berbagai peraturan yang telah ditetapkan tersebut juga mengatur perjalanan anggota DPR RI

yang didampingi oleh Tenaga Ahli dan perjalanan dinas yang tidak didampingi oleh tenaga ahli.

Tidak hanya itu, sebagai pertanggung jawaban, staff administrasi anggota DPR RI juga wajib mencantumkan berbagai persyaratan, seperti adanya persetujuan Pimpinan DPR RI, surat tugas yang didampingi oleh KPA (kuasa pengguna anggaran) satuan kerja dewan, selain itu juga staff administrasi wajib mencantumkan rincian biaya perjalanan dinas (RBPD), serta SPD (Surat perjalanan dinas) yang harus distempel di daerah tujuan. Setelah hari kerja pun anggota melalui staff administrasinya wajib mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas ke bagian perjalanan dinas Setjen DPR RI paling lambat lima hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

“Sedangkan untuk tenaga ahli yang ikut mendampingi perjalanan dinas anggota DPR RI selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana anggota DPR RI tersebut, juga wajib melampirkan bukti pembelian tiket (invoice), tiket asli, *boarding pass*, tiket kereta api, bus/kapal laut. Selain itu untuk pengeluaran taksi harus dibubuhi dengan materai sebesar enam ribu rupiah,” paparnya.

(Ayu) foto: naefuroji/parle/hr

RUU Kebudayaan Sudah Jadi Kebutuhan Bangsa

Bangsa Indonesia sangat kaya dengan keragaman budaya dan situs cagar budaya. Perlu perlindungan hukum yang memadai untuk melestarikannya. RUU Kebudayaan yang sedang dirumuskan Komisi X DPR RI akhirnya menjadi kebutuhan untuk melestarikan kekayaan tersebut.

Anggota Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan hal tersebut di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (11/9), usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke Sumut. "Saya melihat RUU Kebudayaan ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi bangsa. Bangsa yang besar pasti mempunyai peradaban yang tinggi. Dan RUU Kebudayaan ini sudah dibahas sangat panjang selama tiga periode DPR."

RUU ini, jelas Sutan, sedang memasuki harmonisasi untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Setelah itu dibahas dengan pemerintah. Masukan dari masyarakat juga masih terbuka untuk disampaikan agar RUU ini mencapai rumusan yang ideal. "Saya optimis RUU ini bisa diselesaikan sampai akhir tahun ini. RUU sangat ditunggu-tunggu oleh

masyarakat terutama para budayawan dan tokoh adat di Indonesia," papar Anggota F-Gerindra tersebut.

Ditambahkan Sutan, RUU Kebudayaan kelak menjadi induk dari UU yang sudah ada, seperti UU Cagar Budaya, UU Perfilman, dan lainnya yang bersinggungan dengan kebudayaan. Idealnya RUU Kebudayaan lahir lebih dulu daripada UU turunannya. "Masa RUU Kebudayaan belum kita sahkan, anak-anaknya sudah lahir. Mestinya kita dahulukan induknya agar bisa mengamankan seluruh aset budaya kita," urai politisi dari dapil Jambi ini.

Banyak aset budaya yang bisa dilindungi dengan RUU ini, seperti angklung, batik, tari tortor, dan lain-lain. Dengan RUU ini kelak tak ada lagi negara lain yang mengklaim kekayaan budaya Nusantara. Apalagi dalam waktu dekat ada pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan dari dampak adanya MEA tersebut. Untuk itu, RUU ini menjadi tumpuan perlindungan di sektor budaya.

Bila kelak RUU ini sudah disahkan,



Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

akan ada Dewan Kebudayaan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Bahkan, bila memungkinkan, Dewan Kebudayaan juga ada hingga ke tingkat kecamatan. Tugasnya menjaga dan melestarikan aset budaya daerah, hingga mengusulkan anggaran untuk pelestariannya. Istilah "dewan" dalam RUU ini merupakan usulan Sutan sendiri saat rapat pembahasan RUU Kebudayaan. Sebelumnya ada istilah "komisi". Tapi kemudian istilah dewan dinilai lebih tepat.

(mh) foto: husen/parle/hr

Komisi X DPR Dukung Pembangunan GOR Bau-bau



Tim Kunspek Komisi X DPR ke Baubau

Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mendukung usulan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan sarana olahraga lainnya yang sudah direncanakan Pemerintah Kota Baubau. "Kita akan perjuangkan usulan itu di Komisi X DPR RI," ujar Wakil Ketua DPR RI

Ridwan Hisjam saat berdialog dengan Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Masri Kota Baubau baru ini.

Dalam dialog politisi Partai Golkar ini mempertanyakan bagaimana pengelolaan GOR dan Sport Center pasca dibangun sehingga tidak terkesan mubazir dan tetap membawa masukan bagi PAD Kota Baubau.

Menanggapi hal tersebut diatas, Kadis Dikmudora Masri Kota Baubau menjelaskan rencana pembangunan GOR dan Sport Center yang dibangun diatas lahan seluas 20 hektar prioritas utama yang ingin dibangun yaitu stadion utama dan fasilitas kolam renang. Mengingat Kota Baubau mempersiapkan diri akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XIV.

"Selama ini atlet renang menyumbang medali emas terbanyak, namun mereka latihan di laut karena Kota Baubau tidak memiliki kolam renang," ungkap Masri.

Terkait dengan anggaran, menurutnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana olahraga itu nilainya mencapai Rp 250 Miliar. Rencana pengerjaannya akan di-



upayakan mulai dibangun pada tahun 2016 dengan sistem *multiyears*.

Dia menambahkan bahwa Kota Baubau dipersiapkan sebagai calon Ibukota Provinsi Kepulauan Buton, sehingga pembangunan GOR dan Sport Center di Kota Baubau tidak akan mubazir.

Selain itu, jumlah anak sekolah mulai dari tingkat SD hingga mahasiswa berjumlah 51 ribu orang. Angka ini sangat menjanjikan, sebab mereka akan menggunakan sarana olahraga ini sehingga memang GOR dan Sport Center ini akan tetap bisa menggerakkan ekonomi daerah sekitar. (iw) foto: iwan armanias/parle/hr

SERBIA PASTIKAN HADIR DI KONFERENSI GOPAC

Perwakilan Parlemen Rusia, Vukasin Todorovic menyatakan, Delegasi Parlemen Serbia dipastikan hadir pada Konferensi Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), yang akan digelar pada 6-8 Oktober di Provinsi DI Yogyakarta mendatang.

Hal itu pun dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, usai menerima Todorovic, di ruang kerjanya, Gedung Setjen DPR RI, Selasa (15/09/15).

“Beliau memastikan kehadiran Delegasi Parlemen Serbia ke Konferensi GOPAC. Cuma ada keinginan dari Parlemen Serbia, mereka juga ingin hadir ke Indonesia dalam kerangka sebagai tamu undangan, jadi seperti kunjungan muhibah,” kata Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti.

Sempat terungkap juga dalam pertemuan itu, apakah dimungkinkan dilakukan *bilateral meeting* di sela-sela Konferensi Gopac, atau akan dijadwalkan tersendiri. Jika pertemuan dengan DPR RI dijadwalkan di sela-sela

konferensi, maka Delegasi Serbia akan dipimpin Ketua Parlemennya.

Namun jika pertemuan dijadwalkan terpisah, maka Ketua Parlemen akan memimpin Delegasi untuk *bilateral meeting* dengan DPR RI, dengan status tamu resmi DPR RI. Dengan catatan, Delegasi Serbia juga tetap hadir di Konferensi Gopac, dan dipimpin Pimpinan Parlemen Serbia yang lain.

“Rencananya, Delegasi Serbia ingin bertemu dengan Ketua DPR dan Pimpinan DPR, dan berdiskusi lebih luas kepada Komisi I. Tentunya, bagaimana nanti mekanismenya, saya akan laporkan dulu kepada Pimpinan Dewan,” imbuh Win.

Jika nantinya terlaksana pertemuan antara DPR RI dengan Parlemen Serbia, direncanakan akan membicarakan mengenai isu global, salah satunya adalah permasalahan imigran internasional yang jumlahnya lebih dari lima ribu orang. Serbia mengajak Indonesia untuk ikut serta dalam permasalahan ini.

Masih dalam kesempatan yang



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

sama, Todorovic juga menyampaikan undangan Parlemen Serbia kepada DPR RI untuk melakukan kunjungan ke Serbia. Sekaligus nantinya ada MoU yang perlu ditandatangani oleh delegasi dari kedua negara.

“Draft MoU sudah kita kirimkan ke Serbia. Secara prinsip mereka setuju dengan isi draft. Untuk kunjungan DPR RI ke Serbia, mereka menyerahkan kepada DPR RI kapan waktu yang tepat untuk datang ke sana,” tukas Win. (sf)

Sidang Umum ke 36 AIPA Ditutup Presiden AIPA

Seluruh rangkaian acara Sidang Umum ke 36 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan di Hotel Shangri-la Kuala Lumpur, Malaysia sejak awal pekan ini, Minggu (6/09/15), berakhir dengan Sidang Pleno Kedua yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat (11/9/15).

Agenda sidang Pleno Kedua ini adalah penyampaian dan pengadopsian Report dari masing-masing Ketua Sidang Komite, sekaligus mengesahkan sejumlah Draft Resolusi AIPA. Dalam sidang ini, Delegasi DPR RI diwakili oleh Anggota BKSAP, Hamdhani.

Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Communiqué oleh para Ketua atau Wakil Delegasi AIPA sebagai salah satu pencapaian Sidang Umum ke-36 AIPA. Sidang Umum AIPA ke-36 secara resmi ditutup melalui Sidang Pleno



Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang AIPA

Kedua ini.

Pada kesempatan tersebut, Presiden 36th AIPA General Assembly Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Mulia sebelum menutup sidang menjelaskan beberapa hal sehubungan dengan penyelenggaraan Pertemuan AIPA.

Pertama, sehubungan Indonesia belum bisa menjadi tuan rumah AIPA Caucus ke-8, maka pertemuan Caucus tersebut akan diselenggarakan di Laos pada 2016.

Kedua, sehubungan belum ada negara yang bersedia untuk menjadi tuan rumah Sidang Umum ke 37 AIPA dan AIFOCOM

ke 13 yang sedianya akan diselenggarakan di Myanmar pada 2016, maka keputusan mengenai penyelenggaraan Sidang Umum ke 37 AIPA akan didiskusikan kembali melalui Sidang Executive Committee menjelang September 2016 di Malaysia.

Ketiga, karena belum adanya negara yang mau menjadi tuan rumah Sidang Umum ke 37 AIPA, maka Presiden AIPA ke 36 belum dapat menyerahkan jabatannya. Presiden AIPA ke 36 yang sekaligus Ketua Parlemen Malaysia masih menjabat sebagai Presiden AIPA sampai dengan periode mendatang. (sc) foto:

nita/parle/hr

Komisi I : TNI Bergerak Kalau PNG Tidak Mampu

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan atas terjadinya aksi penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah negara tetangga Papua Nugini (PNG). Ia mencermati banyak pihak mendorong TNI untuk segera bertindak, namun menurutnya langkah itu tidak bisa gegabah.

“Kita harapkan secepat-cepatnya, sebisa-bisanya aparat berwenang di Papua Nugini bisa memberikan perlindungan, jangan sampai WNI dibunuh atau apa. Kalau pihak di sana tidak mampu barulah kita memberikan bantuan,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/15).

Politisi Fraksi PDIP ini menekankan

adalah tugas negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya di manapun berada. Selama proses negosiasi ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan, bagaimanapun langkah persuasif tetap harus dikedepankan.

Informasi yang berhasil dihimpun, penyanderaan ini dilakukan oleh OPM yang dipimpin oleh Jeffry, belum diketahui apakah ada tuntutan atau permintaan lain dari para pelaku. Lokasi penyanderaan terpantau di kawasan Keerom, Papua Nugini.

Bicara pada kesempatan berbeda Kapuspen TNI Mayor Jenderal Endang Sodik mengatakan apabila mendapat izin dari Papua Nugini, pasukan TNI siap melakukan operasi pembebasan.



Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin

“Brak bruk 5 menit juga selesai kok, cuma kita tidak mau, karena kita menghormati kedaulatannya PNG dan kita tidak ingin ada korban baru lagi dari WNI kita,” pungkas dia. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr

Komisi VIII Tidak Meminta Tambah Jatah Kuota Haji



Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay membantah pemberitaan yang menyebut bahwa DPR meminta tambahan jatah kuota haji. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan,

Jumat (11/9).

“Judul beritanya kan DPR minta tambahan jatah kuota haji. Itu tidak benar, karena DPR tidak ada alokasi dan jatah kuota haji. Berita itu perlu diluruskan. Hal ini diperlukan agar masalah tersebut tidak menjadi polemik yang mengganggu upaya pemerintah dan DPR dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan haji. Apalagi, pemberitaan yang muncul kelihatannya menyimpang jauh dari konteks yang sesungguhnya,” jelas Saleh.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi PAN ini menjelaskan bahwa DPR hanya memiliki kuota PENGAWASAN haji, bukan kuota haji. Pengawasan haji itu adalah kewajiban konstitusional DPR yang

diatur Undang-Undang. Pengawasan sangat diperlukan terutama untuk melihat secara langsung kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan haji.

“DPR mendapat kuota pengawasan, DPR ke Saudi bukan untuk berhaji, tetapi mengawasi. Buktinya, tim pengawas Gelombang I, sudah kembali ke tanah air sebelum 9 Zulhijjah (Arafah). Berarti, mereka pasti tidak berhaji. Ini harus jelas agar tidak disalahartikan,” tegasnya.

Saleh menduga, munculnya pemberitaan soal DPR minta tambahan jatah haji berawal dari rapat kerja komisi VIII DPR RI dengan menteri agama pada Rabu (9/9) lalu. Saat itu salah satu anggota Komisi VIII menanyakan dasar



dan bagaimana Kementerian agama menetapkan kuota pengawasan haji bagi DPR. Ketika itu Menteri Agama, Lukman Hakim Safiuddin menjelaskan kuota pengawasan adalah 4 persen dari kuota petugas. Dari 4 persen itu dibagi untuk pengawas internal dan pengawas eksternal, termasuk DPR, BPK, DPD, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. Lalu mengapa DPR diberi kuota 51 orang? Itu belum terang penjelasannya.

“Pak Menteri, mengapa tidak dibuat saja kuota pengawasan itu 10 persen dari jumlah anggota DPR?, dengan demikian dari 51 berubah menjadi 56 orang. Memang ada penambahan 5 orang. Itu dinilai rasional karena lebih representatif mewakili institusi DPR

secara kelembagaan,” tanya Saleh kepada Menag pada kesempatan itu.

Kuota pengawasan yang 51 orang ini dipergunakan untuk kuota pimpinan DPR beserta sekretariat pimpinan sebanyak 6 orang, Komisi IX yang bermitra dengan Kemenkes 4 orang, Komisi V yang bermitra dengan Kemenhub 4 orang, dan 32 orang untuk Panja haji Komisi VIII, 2 orang Tenaga Ahli Komisi VIII, dan 3 orang staf Kesekretariatan.

Dalam rapat tersebut Menag dan jajarannya menerima usulan itu atas dasar perhitungan dan rasionalisasi kuota pengawasan DPR itu. Karena pada prinsipnya bukanlah menambah kuota haji, tetapi menambah kuota pengawasan atas dasar perhitungan logis dan rasional.

Dengan adanya Kuota Pengawasan secara jelas, maka ke depan diharapkan dapat menepis isu yang menyebutkan pejabat negara dan DPR memakai kuota haji untuk keluarga dan kerabat. Saleh pun memastikan, bahwa Panja haji Komisi VIII tidak ada yang membawa keluarga dengan memakai kuota jamaah haji Indonesia.

“Kawan-kawan yang berangkat ke tanah suci murni untuk melaksanakan tugas konstitusional, bukan untuk berhaji. Apalagi, hampir semua anggota Panja haji Komisi VIII itu sudah haji, bahkan ada yang selama ini menjadi pembimbing haji,” pungkasnya. (Ayu)

foto: naefuroji/parle/hr

KOMISI I UJI 33 CALON DUBES

Komisi I DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan 33 calon duta besar yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. 47 orang wakil rakyat yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri ini akan memberikan pertimbangan terhadap para kandidat dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

“Masukan publik yang kita terima pasti menjadi perhatian termasuk ada sejumlah kandidat yang disebut mantan orang partai atau mantan tim sukses. Bagi kami itu sah-sah saja diajukan tapi kita hanya memberikan pertimbangan kepada orang terbaik pada posisi yang tepat,” kata anggota Komisi I Elnino M. Husein Mohi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan tidak seperti pembahasan APBN yang sifatnya persetujuan, uji kepatutan dan kelayakan calon dubes hanya memberikan pertimbangan. Ia menyebut bisa saja pertimbangan dari DPR tidak sesuai dengan presiden.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifulah Tamliha mengatakan dalam uji kepatutan dan kelayakan ini pemahaman kandidat negara tujuan serta bagaimana prospek hubungan diplomatik dua negara akan digali. Itulah sebabnya seluruh proses berlangsung dalam sidang tertutup.

“Kita harap publik dan media dapat mengerti kenapa persidangan berlangsung tertutup, ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Nanti bisa saja kita memberikan pertimbangan berbeda dengan usulan presiden, misalnya setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan menurut kita kandidat A cocoknya ditempatkan di negara B bukan di C seperti usulan presiden,” tutur dia.

Uji kepatutan dan kelayakan 33 calon dubes akan berlangsung sampai Kamis (17/9). Keputusan akhir Komisi I akan diambil dalam rapat pleno setelah mendengar pendapat dari seluruh fraksi. Berikut daftar nama calon dubes yang mengikuti *fit and proper test* di Komisi I DPR.

Husin Baqis, Dubes RI untuk UAE

Safira Machrusah, Dubes RI untuk Aljazair

Bambang Antarikso, Dubes RI untuk Irak

Husnan Bey Fananie, Dubes RI untuk Azerbaijan

Ahmad Rusdi, Dubes RI untuk Thailand merangkap UNESCO

Yuri Octavian Thamrin, Dubes RI untuk Belgia

Helmy Fauzi, Dubes RI untuk Republik Arab Mesir

Mochammad Luthfie Wittoeng, Dubes RI untuk Bolivarian Venezuela

Mansyur Pangeran, Dubes RI untuk Senegal



Anggota Komisi I DPR Syaifulah Tamliha

I Gusti Agung Wesaka Puja, Dubes RI untuk Belanda merangkap OPCW

Muhammad Basri Sidehabi, Dubes RI untuk Qatar

Ibnu Hadi, Dubes RI untuk Vietnam

Alfred Tanduk Palembang, Dubes RI untuk Kuba

Wiwiek Setyawati, Dubes RI untuk Finlandia

Iwan Suyudhie Amri, Dubes RI untuk Pakistan

Muh. Ibnu Said, Dubes RI untuk Denmark

Rizal Sukma, Dubes RI untuk Inggris, Irlandia dan IMO

Tito Dos Santos Baptista, Dubes RI untuk Mozambique

Mohammad Wahid Supriyadi, Dubes RI untuk Rusia

Musthofa Taufik Abdul Latif, Dubes RI untuk Oman

Soehardjono Sastromihardjo, Dubes RI untuk Nairobi

Budhy Santoso, Dubes RI untuk

Panama

Dian Triansyah Djani, Dubes RI untuk PBB**Diennaryati Tjokrosuprihatono**, Dubes RI untuk Ekuador**Agus Maftuh Abegebriel**, Dubes RI untuk Saudi Arabia**Amelia Achmad Yani**, Dubes RI untuk

Bosnia-Herzegovina

I Gede Ngurah Swajaya, Dubes RI untuk Singapura**Sri Astari Rasjid**, Dubes RI untuk Bulgaria**R. Bagas Hapsoro**, Dubes RI untuk Swedia**Octavino Alimudin**, Dubes RI untuk

Iran

Antonius Agus Sriyono, Dubes RI untuk Vatikan**Eddy Basuki**, Dubes RI untuk Namibia**Alexander Litaay**, Dubes RI untuk Kroasia. (iky) foto: naefuroji/parle/hr

Panja KSAP Asean Pantau Kesiapan MEA

Panitian Kerja (Panja) Kerja Sama Antar Parlemen di kawasan Asean melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk memantau secara langsung kesiapan pemerintah daerah termasuk masyarakat menyambut penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Hasil pantauan langsung ini akan disampaikan kepada pemerintah dan anggota parlemen dari negara-negara Asean.

“Sejauh mana kesiapan daerah dalam menghadapi potensi dan tantangan dari MEA yang dijadwalkan segera berlaku Desember tahun ini. Hasil pantauan kita sampaikan kepada pemerintah dan menggalang kerja sama dengan anggota parlemen Asean agar program ini berhasil,” kata Ketua Tim Kunjungan Andika Pandu Puragabaya di Denpasar, Bali, Rabu (16/9/15).

Kunjungan diawali dengan melaksanakan dialog dengan Pemprov Bali yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Ketut Sudikerta serta sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia. Ia meyakini permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh sejumlah pihak akan dapat menjadi rujukan daerah lain.

“Laporan soal permasalahan terkait tenaga kerja, sertifikasi pekerja jadi masukan kita. Saya menilai Bali sudah memiliki kesiapan karena dinamika persaingan MEA di provinsi yang menjadikan jasa dan pariwisata sebagai ujung tombak perekonomian sudah berlaku lebih awal,” tutur dia.

Dalam pertemuan tersebut Kepada Dinas Tenaga Kerja



Panja BKSAP DPR kunker ke Provinsi Bali

Provinsi Bali Agung Sudarsana menyampaikan sejumlah permasalahan terkait tenaga kerja. Ia menilai banyak pekerja dari Bali belum siap bersaing secara bebas dengan pekerja lain di Asean.

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan produk hukum untuk melindungi para pekerja di Bali. Dalam aturan tersebut menurutnya perlu dipertegas, setiap pekerja asing harus memahami budaya Bali, kemampuan berbahasa Indonesia serta penetapan standar penghasilan yang harus sama.

Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno yang turut mengikuti kunjungan tersebut berjanji akan menindaklanjuti sejumlah masukan yang berhasil diperoleh. “Temuan di Bali akan kita gunakan dalam menata aturan perundang-undangan agar nantinya MEA betul-betul melindungi rakyat kita,” tekan dia. (iky) foto: ibnur khalid/parle/hr

KORPRI HARUS SIAP HADAPI TANTANGAN



Pengukuhan Ketua Korpri terpilih Mardian Umar

Pengurus dan seluruh Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan dapat selalu menjaga kekompakan dan siap menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, berbagai kegiatan yang diselenggarakan pun dapat terselenggara sukses.

Demikian diharapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, saat menyampaikan sambutan, pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Setjen DPR RI Periode 2015-2020, di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Rabu (16/09/15). Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korpri, Eko Sutrisno.

“Korpri juga turut berperan dalam menegakkan kode etik, walaupun diberikan advokasi hukum jika ada pegawai yang menghadapi masalah hukum, Anggota juga harus ikut menciptakan kondisi yang kondusif agar sesama Anggota dapat bekerja dengan kompak dan nyaman,” pesan Win, panggilan

akrab Winantuningtyastiti.

Win menambahkan, dengan adanya kegiatan Korpri ini, dapat menyatukan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, khususnya untuk kegiatan di luar kedinasan. Sehingga, suasana kaku maupun adu argumen dalam membahas berbagai kebijakan, dapat dinetralisir melalui kegiatan-kegiatan Korpri.

“Kegiatan korpri juga bukan hanya bersifat internal dan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tetapi seluruh pegawai, di lingkungan Setjen DPR. Sehingga lingkungannya semakin luas lagi. Ini juga kesempatan yang bagus, ketika Korpri menyelenggarakan kegiatan, harus melibatkan seluruh pegawai permanen maupun non permanen,” imbuh Win.

Win menambahkan, Korpri Setjen DPR juga mengadakan kegiatan bersama Sekretariat Jenderal DPD, maupun Sekretariat Jenderal MPR. Termasuk Dewan Pengurus Nasional Korpri juga

ikut bergabung dalam kegiatan Setjen DPR RI.

“Kita juga berharap berbagai kegiatan dihidupkan lagi, Karena juga ada kegiatan yang rutin digelar setiap tahunnya. Misalnya pertandingan antar provinsi, antar kementerian dan kelembagaan,” harap Win, selaku Pembina Korpri Setjen DPR RI.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Korpri Setjen DPR RI terpilih, Mardian Umar menyatakan harapan kepada seluruh pengurus maupun anggota Korpri untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan.

“Saya berharap dapat meningkatkan potensi yang ada, misalnya Sumber Daya Manusia, kemudian hal lain untuk bisa mengangkat derajat dan prestasi lain dari Korpri kita,” kata Mardi.

Mardi menjelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melaksanakan rapat internal pengurus ter-

lebih dahulu, guna menyatukan visi dan misi pengurus Korpri.

“Kami juga akan meneruskan program-program pengurus periode sebelumnya, kemudian dari sisi organisasi akan kami sesuaikan. Karena tak lama lagi akan ada Musyawarah Nasional Korpri, di akhir tahun ini,” imbuh Mardi.

Terkait berbagai program Korpri Setjen DPR RI, Mardi mengingatkan adanya partisipasi aktif dari seluruh pengurus dan anggota.

“Anggota maunya apa, itu bisa disampaikan kepada pengurus. Sehingga Korpri ini akan lebih baik dengan adanya dukungan dari seluruh anggotanya. Karena korpri ini dari kita, untuk kita,” harap Kepala Biro Umum Setjen DPR RI.

Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri ini diberikan kepada 48 pejabat di lingkungan Setjen DPR RI, yang terbagi menjadi beberapa bidang. (sf) foto: denus/parle/hr

TAK BOLEH ADA INTIMIDASI PADA KARYAWAN JICT



Anggota Komisi IX Ali Mahir berjabat tangan dengan Serikat Pekerja JICT

Panja Pekerja PT.Pelindo II yang dibentuk Komisi IX DPR RI menyerukan agar tak boleh ada lagi intimidasi kepada para pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), berupa PHK dan mutasi. Suasana harus diciptakan senyaman mungkin tanpa ada kegaduhan selama Panja Komisi IX bekerja dan Bareskrim Polri menyidik kasus dugaan korupsi.

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (F-Nasdem) berharap

agar para pekerja yang terkena PHK dan mutasi oleh direksi JICT, dikembalikan ke posisi semula. “Yang jelas direksi harus merubah keputusannya, mengembalikan karyawan yang sudah dimutasi. Dan pihak direksi berjanji akan mengkaji dan membicarakan kembali masalah ini di tingkat direksi,” kata Mahir usai berdialog dengan direksi JICT di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (16/9).

Politisi dari dapil Jateng II itu menambahkan, Panja Pekerja bentukan Komisi IX ini bisa meyakinkan para pekerja yang terkena PHK dan mutasi untuk kembali ke posisi semula, sepanjang tahapan dan pembahasannya jelas. Hasil Panja nanti bisa menjadi rujukan bagi direksi dan pekerja di lingkungan JICT yang merupakan anak perusahaan PT. Pelindo II ini.

Dan Komisi IX DPR RI telah merespon dengan cepat pengaduan para pekerja JICT dengan mendatangi langsung perusahaan plat merah tersebut. Kegaduhan soal PHK dan mutasi para pekerjanya menjadi konsen Komisi IX untuk ikut mengusut dan memberikan rekomendasi atas masalah ini.

Sementara itu Direktur HRD JICT yang hadir berdialog langsung dengan Komisi IX, menjelaskan, mutasi pekerja yang terjadi bertujuan untuk perbaikan kinerja. Data yang didapat dari Serikat Pekerja JICT, ternyata ada 14 pekerja yang mengalami mutasi. Dan mutasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan *job description* yang ada. Kritik terhadap aksi mutasi yang dilakukan direksi JICT dilontarkan hampir seluruh Anggota Komisi IX yang hadir.

Komisi IX bahkan memberikan *deadline* kepada direksi JICT untuk menyelesaikan kasus pekerjanya hingga Jumat (18/9). Dengan begitu, ada kenyamanan bekerja yang bisa dirasakan para pekerja JICT. Kegaduhan harus segera dihentikan, agar investasi juga bisa terus berjalan. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi IV Setuju Usul Kementerian LHK Adakan Pesawat Udara



Raker Komisi IV DPR dengan Menteri LHK

Dalam rangka kegiatan pengendalian, perlindungan, pengamanan hutan, dan pencegahan kebakaran hutan, komisi IV menyetujui usulan pengadaan pesawat udara atau helikopter oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebesar Rp.650 Milyar.

“Komisi IV menyetujui usulan penyesuaian anggaran dari pagu awal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 untuk pengadaan pesawat udara atau helikopter,” papar Ketua Komisi IV, saat memimpin Rapat kerja membahas Rencana Kerja dan Anggaran dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (16/9), di Gedung DPR, Jakarta.

Dia menuturkan tidak ada armada yang dimiliki Kementerian LHK untuk mengawasi ruang lingkup kerjanya. 120 juta ha bukan hanya bermanfaat bagi Indonesia tapi juga bagi dunia. “Ini hal yang strategis untuk membangun kekuatan kontrol lewat udara,” kata Edhy.

Selain itu, Komisi IV juga menyetujui perubahan anggaran Hibah Luar negeri sebesar Rp.2 Milyar untuk kegiatan Ozone Project Trust Fund-Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) Phase-Out in The Polyurethane Foam Sector Project dari Program Planologi dan Tata Lingkungan ke Program Pengendalian Iklim, dan pergeseran UPT antar program.

Selanjutnya Komisi IV menerima penjelasan Pagu RKA K-L Kemen LHK Tahun 2016 sebesar Rp.6,3 triliun, dan Anggaran Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2,555 Triliun yang dialokasikan untuk DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup dan DAK Sub Bidang Kehutanan.

Terkait penindakan terhadap kebakaran hutan yang terjadi, Komisi bidang Kehutanan ini meminta Kemen LHK menerapkan sanksi tegas pelaku pembakaran hutan.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan dan hutan dengan menerapkan sanksi administrasi, termasuk mencabut izin lingkungan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan serta mendorong percepatan proses penegakan hukum,” tegas Edhy Prabowo. (as) foto: rizka/parle/hr

Ikatan Istri F-PG Beri Bantuan Panti Bina Grahita Belaian Kasih



Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar (IIFPG) foto bersama anak-anak Panti Bina Grahita

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, hal itu jelas tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34. Meski demikian, adalah kewajiban semua insan untuk berbagi pada sesama. Sadar akan hal itu, sebagaimana program sosial yang telah disusun bersama, maka Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar (IIFPG) pimpinan Neti Ade Komarudin, Rabu (16/9) mengunjungi Panti Bina Grahita “Belaian Kasih” di kawasan Kalideres, Cengkareng Jakarta Barat.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sesama. Dan acara ini merupakan bagian dari serangkaian program yang telah kami susun bersama. Mulai dari persiapan, survey lokasi atau panti, pengumpulan dana hingga pada pelaksanaannya hari ini,” jelas Neti kepada wartawan.

Sementara itu Ketua Panitia acara, Eni Mishbakhun mengatakan bahwa

meski acara ini menjadi bagian dari program sosial tahunan, namun persiapannya sendiri pun tidak lebih dari dua minggu lamanya.

Hal ini menjadi bukti akan kekompakan, dan kesadaran bersama dari anggota IIFPG. Adapun bantuan yang diberikan IIFPG kepada panti sosial yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berupa bahan makanan, makanan ringan, susu, pakaian, popok anak, perlengkapan mandi, perlengkapan sholat yang dapat digunakan sehari-hari oleh anak-anak

penghuni panti.

“Terus terang saya terharu, sedih sekaligus bahagia melihat anak-anak yang terlihat gembira akan kedatangan kami. Semoga kunjungan ini bukan yang terakhir kalinya, karena pastinya anak-anak panti ini yang notabene merupakan generasi bangsa juga memiliki hak yang sama untuk dapat hidup layak. Kalau bukan kita siapa lagi yang peduli mereka,” ungkap Neti yang diamininya oleh Ani.

Kepala Panti Hina Grahita Belaian Kasih, Ngapuli Parangin-angin sangat

mengapresiasi kepedulian dari anggota IIFPG, karena sejatinya sebelum ini tidak ada organisasi isteri politisi yang mengunjungi panti ini. Meski panti ini mendapat anggaran dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, namun dengan jumlah anak asuh sebesar 183 anak dan itupun masih dapat terus bertambah, maka niscaya kebutuhan panti ini pun terus bertambah. Dengan kondisi tersebut pastinya membutuhkan lebih banyak lagi dana dari para donator. (Ayu) foto: rizka/parle/hr

DPR MINTA KEMEN PUPR BUAT PETA DARI ACEH HINGGA PAPUA

Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro mengatakan untuk menunjang program satu juta hektar, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat peta dari Aceh hingga Papua.

“Peta tersebut menjadi penting bagi kita agar punya acuan dalam bekerja, misalnya di Aceh berapa irigasi dan bendungan, ada berapa juta hektar sawah, Sumut berapa hektar sawah dan kejelasan wilayah-wilayah lainnya, sehingga kita dapat peta yang jelas dari Aceh sampai Papua,” kata Fauzih saat Raker Komisi V DPR dengan Menteri PUPR M. Basoeki Hadimoeljono di Jakarta, Senin (14/9).

Ia menambahkan, sesuai dengan penjelasan Menteri PUPR sebelumnya, yang menekankan kepada program satu juta hektar sawah, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan pembangunan beberapa bendungan, dirinya mengingatkan bahwa ada beberapa bendungan yang belum optimal.

“Ada sebagian bendungan dan irigasi yang mati selama ini, artinya apa, kalau bisa ini (bendungan/irigasi-red) diberdayakan dan dihidupkan kembali, karena bisa membantu program satu juta hektar sawah tersebut,” terangnya.

Dikesempatan ini, Fauzih mengingatkan, kepada Kementerian PUPR



Anggota Komisi V DPR Fauzih Amro

melalui Dirjen SDA, dimana ada beberapa irigasi di Sumatera, Lampung, Jambi dan daerah lain yang sudah mati dan tidak produktif.

“Sampai hari ini, irigasi kita yang bisa mengairi kurang lebih lima belas ribu hektar sawah juga belum produktif Pak Dirjen, kita sudah rapat dengan Menteri LH, tapi sampai detik ini juga belum ada realisasi yang konkrit dari Dirjen SDA, bagaimana irigasi ini, apa kita stop atau bagaimana,” jelas politisi dari Hanura ini.

Ia menambahkan, bahwa buat apa membangun yang besar-besaran tetapi yang sudah ada tidak bisa diefektifkan dan dimanfaatkan. “Menurut saya manfaatkan dulu yang sudah ada,

baru kita bicara mengenai pembangunan bendungan di 22 titik tadi,” ujarnya dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis ini.

Sementara itu dalam kesimpulan Raker kali ini, Komisi V DPR memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016, dan selanjutnya akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Kementerian PUPR pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

Selain itu Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR agar program masing-masing unit organisasi dilaksanakan pada daerah provinsi kab/kota yang sangat membutuhkan serta disesuaikan dengan masukan dari Komisi V DPR mengenai program pembangunan daerah pemilihan pada provinsi Kab/kota tertentu.

Selanjutnya Komisi V DPR sepakat dengan Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program dalam RAPBN TA 2016 pada unit eselon I dalam RDP mendatang. (nt) foto: rizka/parle/hr

TINDAK TEGAS PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kebakaran lahan dan hutan di berbagai tempat di wilayah Indonesia, membuat geram Komisi IV DPR RI. Pemerintah diminta menindak tegas pelaku pembakaran lahan dan hutan.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan dan hutan dengan menerapkan sanksi administrasi, termasuk mencabut izin lingkungan dan ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan serta mendorong percepatan proses penegakan hukum,” kata Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, Rabu (16/9), di Gedung DPR, Jakarta.

Edhy menuturkan bahwa Menteri LHK telah menjelaskan perkembangan mengenai kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang secara periodik dilaksanakan penanggulangannya, namun Komisi IV merasa belum puas

dengan hasil ini, karena kejadian kabut asap ini bukan pertama kali terjadi, bahkan setiap kali terjadi kabut asap.

“Kami (Komisi IV) harapkan tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan ini (kabut asap), mendorong Pemerintah untuk menanggulangi ini,” katanya.

Menurutnya kabut asap ini bukan hanya menjadi domain kementerian kehutanan, karena ada juga pelaku pembakar itu di kawasan HGU. Ini yang harus disinergikan.

“Sudah ada undang-undang untuk menindak tegas hal ini. Jadi upaya pengawasan dan penegakan hukum harus diterapkan,” tegasnya.

Untuk efek jera, bagi lahan konsesi yang masuk wilayah sudah terbakar tersebut sebaiknya dikembalikan lagi menjadi hutan dan dikelola oleh pemerintah untuk diurus menjadi hutan kembali. Dia juga menyelaskan



Ketua Komisi IV Edhy Prabowo bersama Menteri LHK usai rapat

pemberian ijin yang mudah kepada pengusaha kemudian pengusaha tidak mau menjaganya.

“Tentunya tidak hanya menyerahkan kembali kepada pemerintah, tetapi penjagaan dan pengawasan internal seperti polisi harus diperkuat kehutanan, penyuluh kehutanan, dan anggarannya harus ditambah,” tegasnya.

(as) foto: rizka/parle/hr

DPR Perjuangkan Tambahan Anggaran Basarnas dan BMKG



Suasana RDP Komisi V DPR dengan Kepala Basarnas, BMKG, Bapel BPLS, dan Bapel BPWS

Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan BMKG pada saat pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan

anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis saat RDP dengan Kepala Basarnas, BMKG, Bapel BPLS, dan Bapel BPWS membahas pokok-pokok rencana kerja dan anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2016 di Jakarta, Selasa (11/9).

Dalam penjelasan dihadapan rapat Komisi V DPR, Kepala Badan SAR Nasional FHB Soelistyo menerangkan bahwa berdasarkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran, kebutuhan anggaran Basarnas Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4,11 triliun dengan rincian, program dukungan manajemen dan pelaksanaan Teknis lainnya sebesar Rp. 593,48 miliar, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas sebesar Rp. 319,33 miliar dan Rp. 3,20 triliun untuk Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

“Berdasarkan Surat Bersama dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menkeu No : S-288/MK.02/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 pagu Indikatif dan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Basarnas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,42 triliun yang tersebar ke dalam tiga program tersebut,” jelas Soelistyo.

Namun, lanjutnya, sesuai dengan Surat Menkeu No :

S-505/MK.2/2015 tanggal 7 Juli 2015 perihal Pagu Anggaran K/L dan penyelesaian RKA-K/L TA 2016, anggaran Basarnas mengalami pemotongan sebesar Rp. 432,31 miliar sehingga Pagu Anggaran Basarnas menjadi Rp. 1,98 triliun.

“Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara pagu kebutuhan dengan pagu anggaran maka terdapat selisih kekurangan anggaran (backlog) sebesar Rp. 2,12 triliun atau 51,7 persen,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Muhammad Toha mengatakan dari kekurangan anggaran Rp. 2,12 triliun itu, dirinya mengharapkan semoga ada tambahan anggaran untuk Basarnas.

“Namun kalau misalnya tidak dapat tambahan anggaran, gimana cara menerapkannya, karena hanya 51,7 persen dari kebutuhan yang ada dan bagaimana mengimplementasikan dengan baik,” kata Toha.

Artinya, lanjut Muhammad Toha, program-program pri-

oritas yang sebenarnya ingin dikejar tapi dana tidak cukup. “Untuk itu saran kami dari Fraksi PKB, adalah beberapa program yang kegiatan ada ditahun jamak dan sudah dianggarkan, mohon diselesaikan, dalam artian keinginan kita adalah bermanfaat dan kelihatan,” terangnya.

Untuk itu tambah Toha, dirinya berharap pimpinan dan anggota Komisi V DPR bisa mengupayakan setidaknya dari 51,7 persen dari kebutuhan itu bisa ditambah.

Sementara itu, berdasarkan laporan, BMKG mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2016 Rp. 2.072,43 miliar dimana usulan tersebut dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya sebesar Rp. 90,04 miliar dan Program Pengembangan dan Pembinaan MKG sebesar Rp. 375,20 miliar. Serta kekurangan usulan anggaran terhadap pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 465,25 miliar. (nt) foto: rizka/parle/hr

DPR INGINKAN KODIFIKASI PARSIAL DALAM PEMBAHASAN REVISI UU KUHP



Anggota Komisi III DPR RI FPPP Arsul Sani dalam Forum Legislasi Revisi KUHP

Komisi III DPR RI mempertanyakan sikap pemerintah apakah melalui kodifikasi total (tertutup) atau parsial (terbuka) dalam revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan segera dibahas. DPR RI masih menunggu penjelasan pemerintah terlebih dahulu, termasuk pengajuan Daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 1.600. DPR realistis saja kalau hal itu tidak mungkin selesai untuk lima tahun ke depan, maka sebaiknya sepakat untuk kodifikasi parsial.

“Jadi, DPR RI akan mempertanyakan dulu kepada pemerintah mengapa berkehendak kodifikasi total? Karena itu, kita akan mendengar filosofi, background, alasan pemerintah mengajukan kodifikasi total dalam UU KUHP ini,” tegas anggota Komisi III DPR RI FPPP Arsul Sani dalam forum legislasi ‘Revisi UU KUHP’ bersama guru besar UNPAD Bandung, Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan mantan penasihat KPK H. Abdulah Hehamahua di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Kalau sepakat kodifikasi parsial kata Arsul, maka DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan nanti tinggal membongkar bab dan pasal mana yang perlu dibahas atau tidak. Dalam draft yang dikirimkan pemerintah kejahatan khusus seperti terorisme, pelanggaran HAM berat, narkoba, korupsi (Tipikor), pencucian uang (TPPU), perdagangan manusia

(trafficking), yang semula diatur oleh UU tersendiri, akan dijadikan satu (kodifikasi total) dalam UU KUHP. KUHP terdiri dari 768 pasal dalam dua buku.

Termasuk pasal penghinaan kepada Presiden RI pasal 134 sampai pasal 137 KUHP yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menurut pemerintah ada norma yang berbeda. Tapi kata Arsul, kenapa Presiden RI yang harus melapor? “Jadi, saya sendiri mendukung kodifikasi parsial, fraksi-fraksi sendiri kini sedang menyusun DIM. Komisi III DPR pun akan mengundang masyarakat untuk memberi masukan,” ujarnya.

Yang jelas kata Arsul, kalau fraksi-fraksi nanti mendukung kodifikasi tertutup maka tidak otomatis melemahkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA). Khususnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, karena penguatannya akan diatur dalam aturan peralihan. Namun, itu pun harus pula diikuti dengan percepatan penataan kelembagaan hukum tanpa mengurangi kewenangan, atau melemahkannya.

KPK sendiri menurut Abdullah Hehamahua tidak alergi dengan amandemen UU KPK, karena memang ada pasal yang perlu disempurnakan, tapi bukan untuk melemahkan, melainkan untuk penguatan.

“Sehingga kalau ada keinginan pemerintah untuk membubarkan KPK maka tetap harus ditangani dengan UU khusus. Sebab, 13 kali *judicial review* ke MK hanya satu yang terkait dengan kepentingan KPK, di mana jika komisioner KPK menjadi tersangka tidak otomatis dipecat sampai ada keputusan hukum tetap. Selebihnya untuk menggusur KPK. Seperti penyadapan yang harus dibawah pengawasan pengadilan dan lain-lain. Itulah yang menjadi trauma KPK,” katanya.

Seperti kasus PT TUN Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur, kalau penyadapannya harus di bawah pengadilan atau kejaksaan, maka sebaiknya tidak harus ada KPK. “Kalau pengeledahan dimungkinkan, tapi kalau penyadapan, ya

untuk melemahkan KPK. Bahwa 43 % kasus korupsi itu ada pengadaan barang dan jasa, di kepolisian 60 %, dan APBN 60% juga untuk barang dan jasa. Maka tiga kartu sakti Presiden Jokowi juga demikian,” ungkapnya.

Romli Atmasesmita menegaskan kita jangan sampai terinspirasi pada hukum yang berlaku umum, untuk semua orang, dan untuk seluruh dunia (total codification), agar kita memiliki kedaulatan sebagai negara hukum, sehingga lebih baik kodifikasi terbuka (parcial codification) dan itu lebih mudah. “Kalau kodifikasi umum bisa menimbulkan masalah dengan dunia internasional di tengah diplomasi kita yang lemah,” tuturnya.

Contohnya seks bebas, perkawinan sejenis, minuman keras, perjudian, dan lain-lain menurut Romli, itu kan tercela

di negara Indonesia, tapi tidak demikian di Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia bisa diintervensi oleh asing atau FBI. “Jadi, biarkan hukum berlaku secara parsial, terpisah antara delik, perbuatan kejahatan umum dan kejahatan yang khusus. Jangan disatukan dalam satu KUHP. Dari pada politik hukum kita tidak jelas, sebaiknya menganut sistem kodifikasi parsial dan DPR RI tetap bisa melakukan pengawasan,” pungkasnya.

Selama ini sudah ada UU khusus terorisme, UU tindak pidana korupsi, UU pelanggaran HAM, UU pencucian uang, UU trafficking dan lain-lain. UU khusus tersebut diatur di luar KUHP, yakni UU tersendiri yang khusus mengatur kejahatan khusus tersebut. (nt/sc) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi III Pertanyakan Komnas HAM Hapus Hukuman Mati

Komisi III DPR mempertanyakan sikap Komnas HAM yang menolak hukuman mati bagi orang yang terlibat kasus narkoba. Padahal Indonesia bukan lagi sebagai negara pengimpor, pengedar atau pemakai, namun sudah menjadi negara produsen narkoba.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin pada rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan di ruang rapat Komisi III DPR Senin (14/9) siang.

Dalam acara ini dibahas masalah isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat seperti masalah penanganan kasus narkoba dan ancaman hukuman mati di luar negeri.

Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis dalam acara ini mengusulkan penghapusan pelaksanaan hukuman mati dalam Revisi UU KUHP. “Hak hidup tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Kita

minta dihapus, jangan diatur lagi hukuman mati,” kata Nur Kholis. Ditegaskan Nur Kholis, tidak ada data empiris yang menunjukkan bahwa penghukuman mati itu dengan efek jera.

Namun, usulan Komnas HAM menghapus hukuman mati dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mendapat dukungan dari sejumlah fraksi di Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai usulan Komnas HAM tersebut tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Anggota Komisi III John Kennedy Azis mempertanyakan tolok ukur kerja Komnas HAM berhasil atau tidaknya dalam menangani peristiwa Hak Asasi Manusia (HAM). Dia malah melihat KPAlah yang lebih banyak gerakannya



Anggota Komisi III DPR John Kennedy Azis

tentang anak-anak, jika dibandingkan dengan Komnas HAM.

Dia juga menyoroti masalah hubungan kerja luar negeri, apakah Komnas Perempuan ini juga ada hubungannya pekerjaan keluar negeri. Pasalnya banyak perempuan di luar negeri khususnya para TKI yang terlibat kasus hukum dengan ancaman mendapat hukuman mati, seperti di Malaysia dan Saudi Arabia. (spy,mp) foto: naefuroji/parle/hr



Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas

KASUS BLBI DIMINTA DIUSUT KEMBALI

Pimpinan KPK diminta untuk segera mengusut kasus tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), karena kasus ini sudah bertahun-tahun ditiadakan padahal uang yang dirampok para koruptor itu mencapai Rp.600 triliun rupiah lebih.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas, pada

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dipimpin Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin, di ruang rapat Komisi III DPR Selasa (14/9) sore.

“Saya menginginkan kasus BLBI



yang selama ini diredam bisa diusut lagi. Saya sudah berkali-kali kemukakan dengan pada pimpinan yang terdahulu. Saya menanyakan satu hal, Republik ini mau jadi apa,” tandasnya.

Ditegaskan, pelarian uang kasus BLBI mencapai 600 triliun lebih, namun upaya pengembalian sampai saat ini kita tidak tahu. Begitupun dengan kasus Century, tidak ada penyelesaian-nya.

Kasus BLBI, lanjut dia, pada waktu itu telah menjadi pergunjingan masyarakat luas dan sudah pernah dibentuk

Panitia kerja (Panja) BLBI. Karena itu sudah saatnya kasus ini segera diusut dan ditindaklanjuti kembali, selain itu kasus Century yang pernah diusut bahkan sudah ada Pansusnya hingga kini tidak ada kepastiannya.

“Sekarang harus ada komitmen bersama bukan hanya DPR sebagai lembaga politik, tetapi juga harus ada keinginan bersama dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” tekan dia.

Politisi Fraksi Partai Gerindra meminta aparat penegak hukum untuk menentukan arah dan tetap beru-

paya agar para koruptor tersebut bisa mengembalikan uangnya ke negara.

“Bukan penindakannya yang kita perdebatkan, tetapi bagaimana kerugian negara di masa lalu itu bisa dikembalikan,” kata Supratman.

Pasalnya, dari tahun ke tahun kita membayar utang pokok maupun bunganya dan jumlahnya ratusan triliun dalam APBN yang harus dipikul oleh masyarakat. Ada kurang lebih dana 700 triliun yang mengendap diluar negeri dari hasil kejahatan. (spy,mp)

foto: naefuroji/parle/hr



Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

Anggota Komisi X Dadang Rusdiana menegaskan, segala jenis penelitian riset dan teknologi di seluruh Kementerian dan Lembaga, harus bermuara di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pasalnya, banyak penelitian yang terkesan jalan sendiri.

“Seluruh fungsi-fungsi penelitian harus di sentralisir di Kemenristekdikti, tidak boleh tersebar di kementerian-kementerian lain,” tegas Dadang, di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Menristekdikti Mohamad Nasir, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Selasa (15/09/15).

Dadang menduga, dengan tersebarnya penelitian di berbagai K/L itu, berpotensi terjadi duplikasi penelitian.

Penelitian Harus Bermuara ke Kemenristekdikti

Padahal secara nomenklatur, penelitian berada di wilayah kerja Kemenristekdikti. Ia menilai, hal ini ketidakbenaran dari konsepsi organisasi.

“Duplikasi penelitian tentu ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Menteri Koordinator, karena ini harus segera diluruskan. Perpres tentang nomenklatur K/L itu yang menjadi acuan bersama. Artinya ketika riset ini menjadi satu kementerian, maka seluruh fungsi penelitian mesti ditarik ke dalam Kemenristekdikti,” imbuh Dadang

Politikus F-Hanura itu juga menyarankan, jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Strategis Kemenristekdikti, sangat jelas sekali bahwa idealitas penelitian diarahkan kepada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, informasi dan komunikasi, dan pertahanan.

“Sehingga seluruh kegiatan aktivitas penelitian itu memang harus mengarah kesana. Kita harus relevan dengan masalah bangsa kita hari ini yaitu ketergantungan kita terhadap impor, yang

kemudian menyebabkan ekonomi kita itu mudah sekali terkena turbulensi. Ini harus disikapi dengan prioritas penelitian,” tegas Dadang.

Untuk itu, politikus asal dapil Jawa Barat ini meminta Kemenristekdikti untuk konsisten terhadap dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan, baik itu RPJMN atau Renstra. Sehingga, konsentrasi Kemenristekdikti bukan hanya pada percepatan infrastruktur, yang malah memperlihatkan inkonsistensi Pemerintah terhadap RPJMN.

“Harusnya Kemenristekdikti itu membuka akses sebesar-besarnya kepada lulusan SMA atau SMK untuk kemudian menikmati bangku kuliah,” keluh Dadang.

Sebelumnya, Mensristek menjelaskan capaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia hingga September 2015 diantaranya Ekspedisi Widya Nusantara yang telah menemukan jenis baru vertebrata, invertebrata, dan flora. Berikutnya, pupuk organik hayati, dan kebun raya daerah. (sf)/foto:iwan armarias/parle/iw

BALEG BERENCANA REVISI UU PEMDA

Dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Badan Legislasi DPR RI (Baleg) melakukan pemantauan dan peninjauan ke tiga daerah yaitu Provinsi Aceh, D.I. Yogyakarta dan Kalimantan Timur.

Dari hasil pemantauan dan peninjauan ketiga daerah tersebut, ternyata pelaksanaan UU Nomor 12/2011 tumpang tindih (overlapping) dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.

“Dari hasil pemantauan dan peninjauan ketiga daerah Aceh, Yogyakarta



Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono



dan Kalimantan Timur, ternyata pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan berbenturan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014. Pada UU No. 23 Tahun 2014 fungsi DPRD Tingkat I maupun DPRD Tingkat 2 sangat dibatasi,” kata Ketua Baleg Sareh Wiyono saat memimpin rapat pleno Baleg, Kamis (10/9/2015) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dari hasil temuan di daerah, terang Sareh, perlu dilakukan revisi terhadap

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Karena sebenarnya dengan adanya UU No.12 Tahun 2011 sudah bagus, tapi dengan dibenturkannya dengan UU No. 23 Tahun 2014, dimana UU itu dikalakan dengan perundang-undangan menteri dalam negeri. Sebetulnya peraturan menteri itu dibawah undang-undang dan ini tidak, malah seolah-olah Menteri Dalam Negeri-lah yang mengalahkan UU,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebagai contohnya, lanjut Sareh, pada pasal 252 UU No. 23 Tahun 2014 Menteri Dalam Negeri dapat menghentikan gaji apabila ada sesuatu kebutuhan yang tidak dilaksanakan DPRD, jadi itu tidak benar.

“Oleh sebab itu, kami perlu memanggil Mendagri dan Menteri terkait, sehingga pada rapat prolegnas dan prolegda 2016 nanti perlu kita segera melakukan revisi pada UU No. 23 Tahun 2014 itu,” paparnya. (sc) foto: rizka/parle/hr

Komisi VIII Turut Berduka atas Musibah di Tanah Suci Sekaligus Apresiasi Kinerja PPIH

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay selain mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas musibah jatuhnya crane (alat berat) akibat badai pasir di Masjidil Haram, juga mengapresiasi kinerja Kementerian Agama, khususnya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

“Sudah pasti kami sangat berduka dan turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa sebagian jamaah haji Indonesia di Masjidil Haram. Musibah yang diakibatkan badai gurun tersebut dinilai sesuatu yang berada di luar perkiraan otoritas masjidil haram. Apalagi, menurut informasi teman-teman yang ada di Saudi, badai itu datang begitu cepat dan tidak diperkirakan sebelumnya,” ujar Saleh kepada Parlemen, Senin (14/9).

Tentu tidak mudah mencari informasi siapa saja korban asal Indonesia yang kena musibah ini, lanjut Saleh. Ketika kejadian, jamaah haji Indonesia di Makkah berjumlah 130 ribu orang. Perlu keseriusan dan ketelitian untuk mendata serta memastikan para kor-



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

ban mendapat perawatan yang baik. Namun dengan kerja keras dan koordinasi yang baik antara PPIH, petugas, tim kesehatan, dan rumah sakit telah mampu menyelamatkan korban luka, serta mengidentifikasi identitas korban meninggal dunia dalam waktu yang relatif cepat. Atas kinerja Kementerian agama, khususnya PPIH tersebut, Saleh sangat mengapresiasi.

“Kami, Komisi VIII juga mengapresiasi pola komunikasi Kementerian Agama

dalam menyampaikan informasi ke publik, yakni lewat satu pintu. Itu sangat penting untuk menghindari kesimpangsiuran pemberitaan. Saat rapat dengan menteri agama beberapa hari yang lalu, kami memang meminta agar Kemenag menetapkan juru bicara mengenai informasi haji. Dengan begitu, informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, saran komisi VIII itu telah dilaksanakan. Setidaknya untuk kasus ini, hal itu kelihatan dengan baik. Semoga ini bisa dipertahankan sampai selesainya pelaksanaan ibadah haji,” harap Politisi dari Fraksi PAN ini.

Selanjutnya menurut Saleh, tugas lainnya yang juga perlu diseriusi adalah persiapan PPIH dalam menghadapi Armina. Tugas ini dinilai sangat berat karena saat-saat itu jamaah haji dari seluruh dunia akan terkonsentrasi di Makkah, khususnya di kawasan Arafah dan Mina. Langkah-langkah koordinatif harus tetap dilakukan sehingga seluruh jamaah kita bisa melaksanakan seluruh rukun dan wajib haji sebagaimana disyariatkan. (Ayu) foto: naefuroji/parle/hr



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

DUBES NON KARIR BISA LOLOS ASAL MAMPU

Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* calon duta besar (dubes) yang telah di ajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada sebanyak 33 calon, namun terdapat 14 Calon Dubes yang merupakan non karier atau bukan

seorang yang telah berkarier sebagai diplomat.

Terkait dengan 14 calon dubes non diplomat, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menyatakan, ketika diajukan 33 Calon Dubes kepada Komisi I dua bulan yang lalu sempat menjadi diskursus

publik.

“Kami mempertanyakan skema balas jasa yang dilakukan presiden terhadap para relawannya. Kemudian itu tidak digubris oleh Presiden, Presiden tetap mendorong nama-nama tersebut,” ungkap Tantowi kepada pers, Selasa (15/9) di Jakarta.

“Sekarang ini kami tidak lagi permasalahan itu. Kami sekarang ingin mengetahui kualitas dari calon – calon yang diajukan oleh Presiden. Kalau memang pantas, bagus, patut, ya kami akan rekomendasikan. Jika tidak,

apapun latar belakangnya, akan kami katakan bahwa yang bersangkutan tidak patut dan tidak pantas untuk menjadi perwakilan kita di negara sahabat,” terang Tantowi.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, sejauh ini sudah ada gambaran, tetapi ini bersifat rahasia. Perintah Undang-Undang, kita memberikan pertimbangan. “Jadi pertimbangan kita akan bermuara kepada calon dubes yang diajukan layak atau tidak,” jelasnya.

“Layak dengan catatan, misalnya

yang bersangkutan lebih tepat jika di tempatkan di negara B bukan di negara A sebagaimana yang sudah diplot oleh pemerintah. Jika yang bersangkutan sebelum dikirim harus melalui berbagai pendidikan-pendidikan peningkatan kemampuan, khususnya pada bidang-bidang tertentu,” tegas Tantowi.

Dijelaskan Tantowi, apapun hasil *fit and proper test* ke-33 Calon Duta Besar LBBP RI yang diajukan ke Komisi I akan disampaikan ke Presiden. (skr,mp) foto: [naefuroji/parle/hr](#)

TIM PENGAWAS HAJI KOMISI VIII SESALKAN MASALAH TRANSPORTASI HAJI



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid yang memimpin Tim pertama pengawas haji DPR RI pada 5-11 September 2015 mengatakan masalah trans-

portasi masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 ini.

“Masalah transportasi masih menjadi permasalahan pada pelaksanaan ibadah tahun ini. Orang salah paham kenapa Kami (DPR-red) memotong biaya upgrade (perbaikan) transportasi haji. selama puluhan tahun Menteri agama untuk mendapatkan bis yang bagus menggunakan pola kontrak plus biaya upgrade. Katakanlah kontrak 100 dan biaya upgrade bis 50 juga dibebankan ke jemaah, jadi 150. Ini sangat membebankan jemaah sehingga mempengaruhi besaran BPIH (biaya perjalanan ibadah haji). Mengapa tidak langsung saja mengontrak bis dengan biaya 125

atau 130 namun dengan kondisi bis yang layak jalan? Itu yang tidak mereka jelaskan. Oleh karena itu akhirnya Komisi VIII memotong biaya atau anggaran *upgrade* untuk bis,” papar Politisi dari Fraksi Partai Gerinda.

Sayangnya, saat tim pertama pengawasan ibadah haji datang pada 5-11 September 2015 lalu masih menjumpai bis dengan kualitas di bawah standar kelayakan. Hal ini tentu sangat disesalinya. Meski demikian, untuk permasalahan pemondokan dan catering haji, sejauh ini Sodik mengakui sudah ada peningkatan kualitas dan pelayanan terhadap dua hal tersebut. (Ayu) foto: [naefuroji/parle/hr](#)

Anggota Dewan Perlu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prima

Padatnya kegiatan DPR dalam pelaksanaan amanat kontitusionalnya, menuntut kesiapan seorang anggota Dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan yang ada. Hal ini berimplikasi pada perlunya seorang anggota Dewan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian dikatakan Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso saat memimpin Tim Kunker ke Rumah Sakit

Santo Boromius dan ke Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Jawa Barat Rabu (16/9) sore.

Agung mengatakan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No.68 tahun 2014 serta aturan pelaksanaan dan Permenkeu No.167 tahun 2014 bahwa anggota DPR sebagai pejabat negara termasuk anggota keluarganya diberikan pelayanan kesehatan melalui askes yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan BBJK Kesehatan.



Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso

Namun dalam pelaksanaannya, kata Agung, yang dilakukan oleh rumah sakit provider masih banyak kekurangannya. “Karena itu perlu saran dan masukan dari para anggota DPR, terkait permasalahan dan hambatan yang ter-



jadi pada saat implementasi layanan RS Provider baik di Jakarta maupun di daerah. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah pelayanan yang kurang memadai,” tegasnya.

Hal ini disebabkan karena “Program Jaminan Kesehatan (Jamkestama) bagi anggota DPR beserta keluarganya” belum tersosialisasi dengan baik kepada Rumah sakit Provider. Selain itu, masih ditemukan beberapa rumah sakit provider yang belum memiliki

sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pelayannya.

Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Jamkestama bagi anggota DPR beserta keluarganya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka BURT DPR perlu melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit Provider PT Asuransi Jasindo dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dimaksud.

Menurut Agung, PT Asuransi Jasindo sudah tepat memilih Provider Rumah Sakit untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan program pelayanan Jamkestama.

“Kami harus memastikan bahwa RS yang bekerjasama dengan Jasindo sebagai provider adalah RS yang betul-betul mempunyai kualitas, dan layak serta pantas untuk melayani para pasiennya,” ia menegaskan. (spy,mp) foto: iwan armanias/parle/hr

PANJA PELINDO II BISA SELIDIKI HUTCHISON DI HONGKONG



Rapat Panja Komisi VI DPR dengan Dirut Pelindo II RJ. Lino

Panitia Kerja (Panja) Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR RI bisa saja mencari informasi langsung ke Hongkong untuk selidiki Hutchison Port Holding (HPH), perusahaan asing yang mendapat konsesi pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat Panja yang menghadirkan Dirut Pelindo II RJ. Lino, Rabu (16/9). Menurut Hafisz, Komisi VI menilai perpanjangan konsesi antara PT. Pelindo II dengan HPH telah melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Bahkan, Panja telah mengungkapkan bahwa tiga Menteri Perhubungan per-

nah meminta Dirut PT. Pelindo II untuk membatalkan konsesi tersebut.

“Semua pihak akan dipanggil ke Panja. Besar kemungkinan kami akan datang ke Hongkong melihat Hutchison Port Holding. Kontrak ini melibatkan banyak pihak. Tidak tertutup nama-nama yang disebutkan dalam konsesi ini akan kita undang ke Panja juga kementerian teknis,” ungkap Hafisz. Seperti diketahui, HPH mendapat perpanjangan konsesi hingga 2038 untuk mengelola Jakarta Interntional Container Terminal (JICT) sebagai salah satu operator pelabuhan.

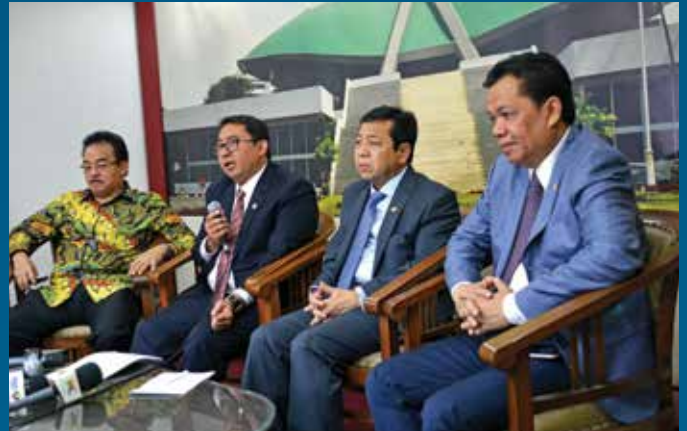
Bila ditemukan indikasi pelanggaran UU, maka konsesi tersebut harus dibatalkan demi hukum. “Kita baru

bicara UU belum bicara materi dari perpanjangan kontrak tersebut. Good governance perlu kita tegakkan, apakah dalam proses lelang barang dan jasa sudah memenuhi kriteria pelelangan yang benar. Kita akan jajaki kriteria tersebut. Informasi yang kami dapatkan belum memenuhi kriteria,” ungkap Hafisz.

Para anggota Panja yang hadir menghujani Dirut Pelindo II dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan tajam. RJ. Lino berusaha tenang menjawab setiap pertanyaan anggota Panja. Usai rapat, Lino mengaku, tak merasa

tertekan dengan kritik dan pertanyaan dari Panja. “Saya tidak merasa tertekan. Kita sangat fair, karena diskusinya sangat terbuka,” ujar Lino kepada para wartawan.

Ketika ditanya bahwa kontrak konsesi itu melanggar UU, Lino menjawab santai, “Saya merasa sudah sesuai undang-undang. Bahwa ada yang berbeda pendapat, itu boleh saja.” Sementara itu Hafisz menambahkan, sebagai otoritas operator lapangan, Pelindo harus tunduk pada UU Pelayaran dan UU Kepelabuhanan. Mestinya yang memberikan otoritas konsesi di pelabuhan adalah Kementerian BUMN. (mh) foto: andri/parle/hr



Pimpinan DPR RI Setya Novanto dan Fadli Zon didampingi Ketua BURT Roem Kono dan Robert Joopy Kardinal saat menggelar konferensi pers terkait hasil Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat di Press Room DPR, Senin (14/9). Foto: Naefuroji/Parle/HR



Ketua Delegasi Indonesia Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani saat menyampaikan pidatonya di hadapan Rapat Pleno Pertama Sidang Umum ke-36 Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kualalumpur, Malaysia, Senin (07/09) Foto: Suciati/Parle/HR



Tim Panja KSAP DPR RI dipimpin Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno memantau secara langsung kesiapan Pemda dan masyarakat Bali menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Rabu (16/09). Foto: Ibnur Khalid/Parle/HR